



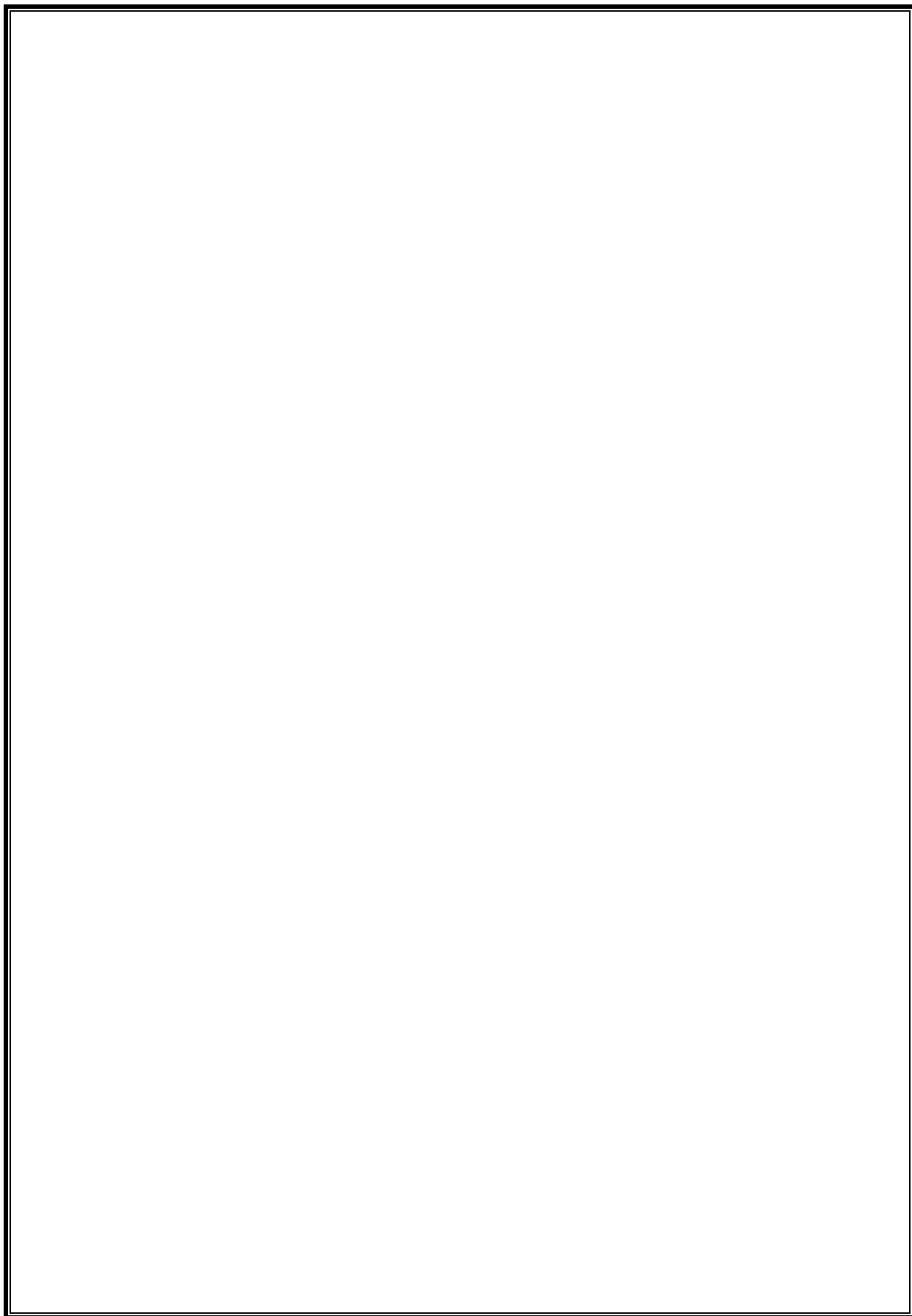
**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RENSTRA**



**Biro Bina Mental dan Kesra**

**TAHUN 2016-2021**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Renstra Biro Bina Mental dan Kesra Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tuga Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Seiring dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan SKPD yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Renstra Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021.

Kepada Tim Penyusun Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga Renstra ini dapat diselesaikan. Akhir kata, kritikan dan saran dari pembaca kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini.

**KEPALA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA**

**Drs. H. SYAHRIL. B, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580405 197903 1 005

# *Daftar Isi*

Halaman

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang ..... 1
- 1.2. Landasan Hukum ..... 3
- 1.3. Maksud dan Tujuan ..... 5
- 1.4. Sistematika Penulisan ..... 6

### **BAB II GAMABARAN PELAYANAN BIRO BINA MENTAL DAN KESRA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Bina Mental  
Dan Kesra..... 7
- 2.2 Sumber Daya Biro Bina Mental dan Kesra..... 9
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Bina Mental dan Kesra..... 14
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  
Biro Bina Mental dan Kesra..... 15

### **BAB III PERMASALAHN ISU-ISU STRATEGIS BIRO BINA MENTAL**

#### **DAN KESRA**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan  
Fungsi Pelayanan Biro Bina Bina Mental dan Kesra..... 17
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Terpilih ..... 18
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 19

3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	21
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	22

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Mental Dan Kesra .....	24
-----	--	----

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1	Strategi dan Kebijakan Biro Bina Mental dan Kesra.....	27
-----	--	----

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	37
-----	---	----

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan transparan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolak ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Penetapan Renstra OPD merupakan langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan yang baik. Penetapan Renstra OPD ini merupakan hal yang strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima)

tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal di atas lebih lanjut kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman bagi masing-masing OPD dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Renstra OPD disusun mengacu kepada RPJM daerah, dan merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan aspek-aspek strategis dan lebih operasional dari RPJM itu sendiri.

Renstra Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun mengacu kepada tugas dan fungsi Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Renstra Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat telah mengacu pada sistematika penyusunan yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) merupakan salah satu OPD dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan yang menyangkut sosial kemasyarakatan.

Untuk mendukung RPJM Daerah, Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat ikut memberikan andil lewat program dan kegiatan yang direncanakan pada Renstra 2016 s/d 2021 yang diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sitem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk mendapatkan kesatuan arah dan pandangan bagi masing-masing bagian di Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka ikut serta melaksanakan dan merealisasikan program pembangunan pemerintah daerah.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Loyalitas personil terhadap pimpinan dalam mendukung tercapainya kinerja yang maksimal;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas prioritas pembangunan daerah;
3. Menciptakan peraturan-peraturan yang berorientasi kepada tercapainya realisasi kegiatan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dalam pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan koordinasi kepada OPD dan Stakholder terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran;

5. Meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan dengan memfasilitasi antar sektor dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelayanan yang diberikan oleh Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat sebagai OPD yang berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada pelaksanaannya berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Biro sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan salah satu dari Biro dibawah Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok ***menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan Pengoordinasian, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi Bina Mental, Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha serta kesejahteraan Rakyat.***

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental, pengembangan generasi muda dan tata usaha serta kesejahteraan rakyat;
2. Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental, pengembangan generasi muda dan tata usaha serta kesejahteraan rakyat; dan
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental, pengembangan generasi muda dan tata usaha serta kesejahteraan rakyat.

Sedangkan rician tugas Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2 Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum bina mental, pengembangan generasi muda dan tata usaha serta kesejahteraan rakyat;
- 3 Menyelenggarakan pengoordinasi da fasilitasi bina mental;

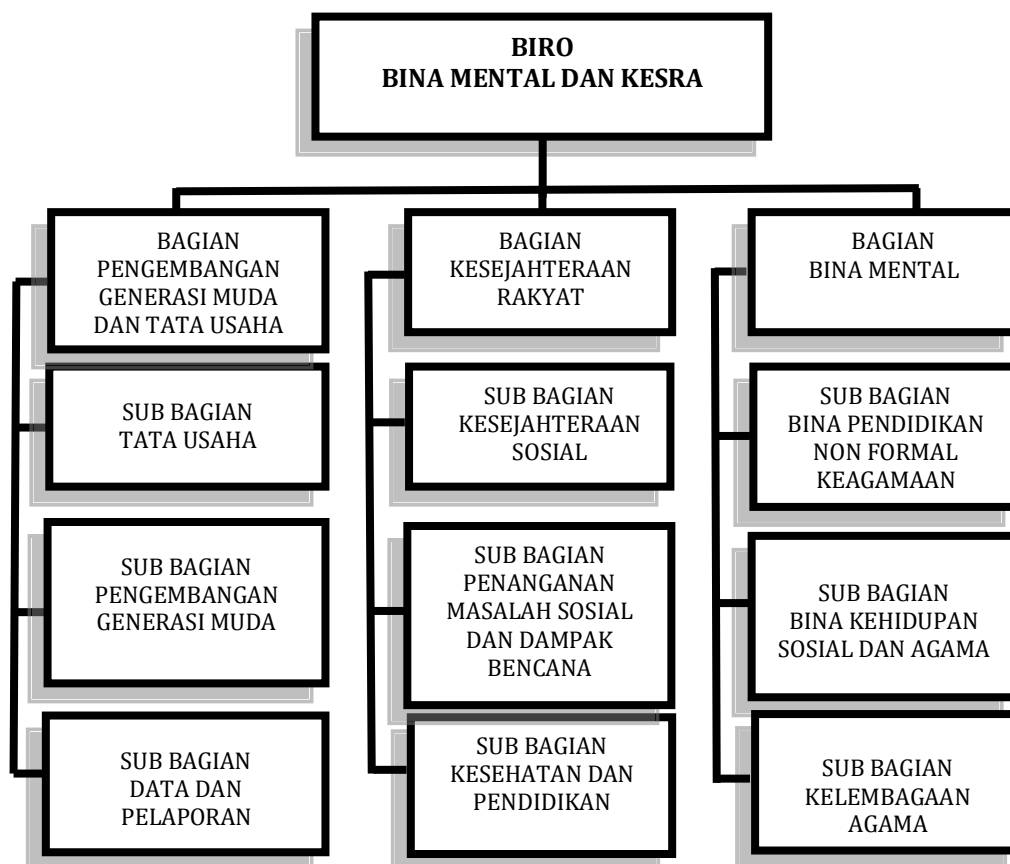
- 4 Menyelenggarakan pengoordinasi dan fasilitasi pengembangan generasi muda dan tata usaha;
- 5 Menyelenggarakan pengoordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat
- 6 Menyelenggarakan telaahan ataf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7 Menyelenggarakan ketatausahaan biro;
- 8 Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi pelayanan bina mental, pengembangan generasi muda dan tata usaha serta kesejahteraan rakyat;
- 9 Menyelenggarakan pengoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 10 menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Biro Bina Mental dan Kesra dibagi dalam beberapa bagian dan sub bagian yang terdiri dari :

1. Bagian Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha, yang terdiri atas :
  - 1.1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 1.2. Sub Bagian Pengembangan Generasi Muda
  - 1.3. Sub Bagian Data dan Pelaporan
2. Bagian Bina Mental, yang terdiri atas :
  - 2.1. Sub Bagian Bina Pendidikan Non Formal Keagamaan
  - 2.2. Sub Bagian Bina Kehidupan Sosial dan Agama
  - 2.3. Sub Bagian Bina Kelembagaan Agama
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas :
  - 3.1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
  - 3.2. Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial dan Dampak Bencana
  - 3.3. Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan

Sebagai ilustrasi dapat ditampilkan bagan struktur organisasi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap seperti gambar 2.1 berikut

**BAGAN 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**2.2 SUMBER DAYA BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus didukung oleh bagaimana kesiapan kondisi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat di dalam, yang dapat berupa unsur-unsur seperti sarana dan prasarana, potensi atau SDM personil yang ada, juga kebijakan yang dilahirkan. Pada intinya unsur atau komponen tersebut saling sinergi satu sama lain untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut disampaikan data sumber daya dan aset Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat saat ini:

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per Desember 2016 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Bina Sosial berjumlah 61 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 59 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 32 orang (52.46%) laki-laki dan 29 orang (47.54) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan hampir seimbang dan hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya. sedangkan untuk rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**TABEL 2.2.1**  
**RINCIAN PNS BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SETDA PROV. SUMBAR**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	22	36%
3	DIPLOMA III/D-3	6	10%
4	STRATA 1	23	38%
5	STRATA 2	10	16%
6	STRATA 3	-	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

**Tabel. 2.2.2**  
**Daftar Golongan Pegawai**  
**Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	9	14,75%
3	Golongan III	42	68,85%
4	Golongan IV	8	13,12%
5	PTT	2	3,28%
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	

### 2.2.2 Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat dilihat pada tabel 2.2.2 beriku ini :

**TABEL 2.2.2  
SARANA DAN PRASARANA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA  
PER 30 Juni 2016**

No. Urut	SPESIFIKASI BARANG	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		KETERANGAN
	Nama/Jenis Barang			Barang	HARGA (Rp)	
1	4	12	13	14	15	16
1	Mesin Tik	Buah	B	1	374,000	PGM & TU
2	Mesin Tik	Buah	B	1	374,000	PGM & TU
3	Mesin Tik	Buah	B	2	749,000	Bintal
4	Mesin Tik	Buah	B	1	3,675,000	PGM & TU
5	Mesin Tik	Buah	B	1	3,675,000	Bintal
6	Mesin Pemotong/ Penghancur Kertas	Buah	B	1	3,970,000	PGM & TU
7	Lemari TV	Buah	B	1	760,000	PGM & TU
8	Lemari Rak Kaca	Buah	B	1	9,955,200	Ka.Biro
9	Lemari Arsip	Buah	B	5	32,037,500	PGM & TU
10	Lemari Arsip	Buah	B	3	19,222,500	Bintal
11	Lemari Arsip	Buah	B	3	19,222,500	Kesra
12	Lemari Arsip	Buah	B	2	12,815,000	Budaya
13	Lemari Arsip	Buah	B	1	6,090,000	PGM & TU
14	Lemari Arsip	Buah	B	3	18,270,000	Bintal
15	Lemari Arsip	Buah	B	1	6,090,000	Kesra
16	Lemari Arsip	Unit	B	2	13,300,000	Kesra
17	Lemari Pajangan	Unit	B	2	39,100,000	Kesra
18	Filling Cabinet	Buah	B	1	406,000	PGM & TU
19	Filling Cabinet	Buah	B	4	7,673,600	PGM & TU
20	Filling Cabinet	Buah	B	1	1,918,400	Bintal
21	Filling Cabinet	Buah	B	1	5,621,000	PGM & TU
22	Filling Cabinet	Buah	B	1	5,621,000	Bintal
23	Filling Cabinet	Buah	B	1	5,621,000	Kesra
24	Filling Cabinet	Buah	B	1	5,621,000	Budaya
25	AC Split	Unit	B	1	5,616,000	Ka. Biro



26	AC / Alat Pendingin	Unit	B	4	29,400,000	Bintal
27	Genset	Buah	B	1	<b>89,700,000</b>	Bintal
28	AC / Alat Pendingin	Unit	B	1	21,500,000	Kesra
29	Komputer PC	Unit	B	1	7,487,000	Kesra
30	Komputer PC	Unit	B	1	3,743,000	Bintal
31	Komputer PC	Buah	B	1	7,000,000	Bintal
32	Komputer PC	Unit	B	2	26,400,000	PGM & TU
33	Komputer PC	Unit	B	2	19,600,000	Bintal
34	Komputer PC	Unit	B	2	19,600,000	Kesra
35	Komputer PC	Unit	B	2	23,900,000	Bintal
36	Komputer PC	Unit	KB	1	11,950,000	PGM & TU
37	Komputer PC	Unit	B	1	14,750,000	PGM & TU
38	Komputer PC	Unit	B	1	14,750,000	Kesra
39	Komputer PC	Unit	B	1	14,750,000	Kesra
40	Komputer Notebook	Unit	B	1	10,000,000	Kesra
41	Komputer Notebook	Unit	B	2	20,000,000	Bintal
42	Komputer Notebook	Buah	B	1	14,300,000	PGM & TU
43	Komputer Notebook	Buah	B	1	10,550,000	TU
44	Komputer Notebook	Buah	B	1	16,500,000	Bintal
46	Komputer Notebook	Buah	B	1	8,680,000	PGM & TU
47	Komputer Notebook	Buah	B	1	8,250,000	Kesra
48	Komputer Notebook	Unit	B	2	32,700,000	PGM & TU
49	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,460,000	PGM & TU
50	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,460,000	PGM & TU
51	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,460,000	PGM & TU
52	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,460,000	Budaya
53	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,460,000	Bintal
54	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,200,000	PGM & TU
55	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,200,000	Bintal
56	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,200,000	Bintal
57	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,200,000	Bintal
58	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,200,000	PGM & TU
59	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,850,000	Bag. Bintal
60	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,850,000	Kesra
61	Komputer Notebook	Unit	B	1	9,850,000	Kesra
62	Printer	Buah	B	1	950,000	PGM & TU
63	Printer	Buah	B	1	925,000	PGM & TU
64	Printer	Buah	B	1	1,050,000	Kesra
66	Printer	Unit	B	1	4,380,000	PGM & TU
68	Printer	Unit	B	1	1,450,000	PGM & TU
69	Printer	Unit	B	1	1,300,000	PGM & TU
70	Printer	Unit	B	2	2,600,000	Bintal
71	Printer	Unit	B	1	1,300,000	Kesra

72	Printer	Unit	B	1	1,950,000	PGM & TU
73	Printer	Unit	B	1	1,950,000	Ka.Biro
74	Printer	Unit	B	1	1,950,000	Kesra
75	Printer	Unit	B	1	1,950,000	Kesra
76	Printer	Unit	B	1	1,950,000	Kesra
77	Printer	Unit	B	1	1,950,000	Kesra
78	Hardisk Eksternal	Unit	B	3	2,826,000	PGM & TU
79	Brangkas	Buah	B	1	27,300,000	PGM & TU
80	Meja Tulis	Buah	B	5	1,966,000	Kesra
81	Meja Tulis	Buah	B	5	1,966,000	Bintal
82	Meja Kerja Eselon IV	Buah	B	1	749,000	PGM & TU
83	Meja Kerja	Buah	B	3	243,600	PGM & TU
84	Meja Kerja	Buah	B	1	2,311,000	PGM & TU
85	Meja Kerja Eselon IV	Buah	B	2	154,000	Kesra
86	Meja Kerja	Buah	B	1	439,000	PGM & TU
87	Meja Kerja	Buah	B	3	1,156,000	Budaya
88	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	5,461,500	PGM & TU
89	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	5,461,500	PGM & TU
90	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	5,461,500	Budaya
91	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	5,461,500	Bintal
92	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	5,461,500	Kesra
93	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	5,461,500	PGM & TU
94	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	5,461,500	Budaya
95	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	5,461,500	Kesra
96	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	5,461,500	Bintal
97	Meja Kerja Eselon II	Unit	B	1	11,666,325	Ka. Biro
98	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	7,788,000	Budaya
99	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	7,788,000	Kesra
100	Meja Kerja Eselon III	Unit	B	1	7,788,000	PGM & TU
101	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	7,299,600	Kesra
102	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	7,299,600	Bintal
103	Meja Kerja Eselon IV	Unit	B	1	7,299,600	PGM & TU
104	Meja Kerja Eselon IV	Buah	B	2	7,300,000	Kesra
105	Meja Rapat Undangan	Unit	B	10	39,284,000	PGM & TU
106	Sofa	Unit	B	1	19,432,600	PGM & TU
108	Kursi Kerja Eselon II	Unit	B	1	7,766,000	Ka.Biro
109	Kursi Kerja Eselon III	Unit	B	1	6,006,000	Bintal
110	Kursi Kerja Eselon III	Unit	B	1	6,006,000	PGM & TU
111	Kursi Kerja Eselon III	Unit	B	1	6,006,000	Budaya
112	Kursi Kerja Eselon III	Unit	B	1	6,006,000	Kesra
113	Kursi Kerja Eselon IV	Unit	B	1	4,752,000	PGM & TU
114	Kursi Kerja Eselon IV	Unit	B	1	4,752,000	Kesra
115	Kursi Kerja Eselon IV	Unit	B	1	4,752,000	PGM & TU

116	Kursi Menghadap Es II	Unit	B	2	10,626,000	PGM & TU
117	Kursi Kerja	Unit	B	4	2,960,000	PGM & TU
118	Kursi Kerja	Unit	B	6	4,440,000	Bintal
119	Kursi rapat Undangan	Unit	B	25	29,975,000	PGM & TU
120	Kursi Rapat Pimpinan	buah	B	2	3,920,200	PGM & TU
121	Handycam	Unit	B	1	8,500,000	PGM & TU
122	Proyektor	Unit	B	1	22,600,000	PGM & TU
123	Proyektor/Infokus	Unit	B	1	16,400,000	Kesra
124	Infokus	Buah	B	1	24,090,000	Kesra
125	Televisi	Buah	B	1	2,822,000	
126	Televisi	Unit	B	3	29,100,000	Kesra, Bintal, KA Biro

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat, selain melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi) sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, juga urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.

Implementasi dan aplikasi dari Tupoksi tersebut diwujudkan kedalam program dan kegiatan yang secara umum berorientasi kepada tercapainya target realisasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama.

Menuju arah yang diinginkan tersebut di atas, Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi, interaksi dengan OPD dan Stakeholders terkait. Koordinasi dan interaksi dapat berupa pelayanan dalam bentuk melakukan pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi jalannya kegiatan yang dikelola oleh Stakeholders tersebut. Selain itu program dan kegiatan yang dikelola OPD dan Stakeholders terkait agar mencapai sasaran, Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat juga melaksanakan pelaporan dan evaluasi sebagai bentuk tanggungjawab kepada Gubenur.

Mencapai hal tersebut di atas perlu didukung oleh kondisi internal Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat yang solit, hal ini mengingat

adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja personil dalam penyelenggaraan tugas selain faktor yang berasal dari dalam sendiri. Untuk itu Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat akan lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disiplin kerja untuk menuju keberhasilan pencapaian kinerja. Selain itu juga perlu didukung oleh :

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Membentuk pola pikir dan budaya kerja pada organisasi;
3. Perlu adanya komitmen yang kuat dengan OPD dan Stakeholders dalam pelaksanaan kegiatan yang saling bersinergi;
4. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat, banyak hal dapat diaplikasikan untuk melakukan pengendalian, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama. Namun di dalam pelaksanaannya untuk mencapai keberhasilan pembangunan secara optimal tidaklah mudah, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi, baik dengan OPD pelaksana kegiatan, juga berasal dari masyarakat.

Dari tantangan yang ada, sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah (Gubernur), Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat tidak akan terpaku hanya pada tantangan belaka, tapi tetap eksis dengan membuka peluang melakukan pengembangan pelayanan.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dari organisasi adalah sebagai berikut :

##### **➤ Tantangan**

1. Besarnya tuntutan masyarakat akan peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama yang belum diikuti dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan secara optimal,

disebabkan oleh berbagai kendala dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik dari segi pembiayaan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia.

2. Penanganan terhadap berbagai masalah kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, pembinaan pemuda dan olahraga serta agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perlu diselenggarakan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat aktif.
3. Memfasilitasi untuk mencari solusi permasalahan yang ada antara OPD dengan OPD di Provinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antara OPD dengan masyarakat;

➤ **Peluang Pengembangan Pelayanan**

1. Meningkatkan kompetensi organisasi dengan menyertakan para personil mengikuti pelatihan teknis dan fungsional serta pelatihan khusus yang mendukung tupoksi organisasi.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
3. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sangat diprioritaskan bagi masyarakat dan sangat berpotensi terjadinya permasalahan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Dalam rangka menentukan Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan diperlukan analisis isu-isu strategis yang juga ditujukan untuk lebih menjamin efektifitas dan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016-2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat lima tahun kedepan.

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Berdasarkan kondisi terkini dapat kami sampaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat yaitu :

1. Masih rendahnya pelaksanaan koordinasi bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan baik antar instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah.
2. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pembangunan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
3. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
4. Kurangnya fasilitasi pengembangan organisasi bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
5. Kurang optimalnya pembinaan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut adalah sebagai berikut :

**Madani** : Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

**Sejahtera** : Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dan perilaku atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang

berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah ini didukung oleh Misi yang secara umum adalah merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat. Adapun Misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut selain didukung oleh misi, berikutnya juga ditetapkan tujuan, agenda, prioritas dan program/kegiatan.

Program dan Kegiatan adalah merupakan wujud akhir untuk melaksanakan pembangunan, baik secara fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sasaran langsung untuk kebutuhan masyarakat.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Renstra Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi



Sumatera Barat, sesuai dengan hal tersebut maka disepakatilah Visi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat “ **Terwujudnya Pembangunan Sosial Kemasyarakatan yang Berkesinambungan** “.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

1. Terwujudnya pelayanan terbaik dalam Bidang Sosial Kemasyarakatan.
2. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamis.
3. Diwarisinya dan diamalkannya serta dilestarikannya nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera dan produktif.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan indentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh biro, hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Kekuatan (Strengths).**

- a. Adanya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan.
- b. Adanya Personil PNS Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan latar belakang yang berbeda-beda.
- c. Memiliki Perda dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi
- d. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Adanya sarana dan prasarana internal biro.

**2. Kelemahan (Weakness).**

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana internal khususnya kendaraan operasional dan perangkat teknologi informasi serta gedung dan bangunan.

- b. Teknologi program aplikasi sistem informasi belum memadai.
- c. Kurangnya pengetahuan dan wawasan bagi Pegawai Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan kedepan.
- d. Data-data Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih bersifat manual.

### **3. Peluang (Opportunities).**

- a. Dukungan Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota terhadap peningkatan kualitas aparatur.
- b. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan.

Pernyataan Visi dan Misi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan arahan bagi seluruh Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kesejahteraan PNS menuju PNS yang professional.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dalam melaksanakan fungsinya di Bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat dalam pemberian layanan tidak memiliki pelayanan yang dapat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan Revolusi Mental dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Peningkatan implementasi kesalehan sosial dalam hidup bermasyarakat terutama dalam mengatasi dan menangani masalah sosial.
3. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan agama dan adat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan.
4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya daerah ditengah kehidupan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.
7. Peningkatan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter dilandasi nilai-nilai agama dan adat budaya serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
8. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.

9. Peningkatan pemanfaatan dan penerapan hasil iptek dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
11. Optimalisasi penerapan kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat baik jangka panjang maupun jangka pendek yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk memperkuat keberadaannya di masyarakat
4. meningkatnya pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
5. meningkatnya koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan
2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat

3. Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi sumber daya manusia dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan
4. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
5. Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Bina Mental & Kesejahteraan Rakyat**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan haji.	%	6	6	6	6	6	6
2.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	1. Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	%	10	10	10	10	10	10
			2. Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional	%	7	7	7	7	7	7
			3. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	%	10	10	10	10	10	10
3.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	1. Jumlah Lembaga Didikan subuh yang diberikan penghargaan	Penghargaan	6	6	6	6	6	6
			2. Persentase Terbentuknya Tim Pembina dan Sekretariat TP UKS/M a. Kab/ Kota	%		55 30	60 40	65 50	70 60	75 75

	memperkuat keberadaannya di masyarakat		<p>b. Kecamatan</p> <p>4. Jumlah Guru TPQ/MDT yang dilatih</p> <p>5. Jumlah pengurus rumah ibadah yang dilatih</p> <p>6. Jumlah Guru Pondok AlQuran yang dilatih</p>	Orang		95	95	95	95	95
				Orang		270	270	270	270	270
				Orang		90	90	90	90	90
4.	meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	1. Jumlah ninik mamak penghulu, bundo kanduang yang ditingkatkan pengetahuannya	orang			120	120	120	120
5.	meningkatkan koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	1. jumlah hasil rumusan rapat koordinasi yang ditindaklanjuti - Bidang Sosial - Bidang Kepemudaan		6	6	6	6	6	6
							1	1	1	1

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah.

Adapun strategi Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya.
3. Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan.
4. Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan

Sedangkan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan.



2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
4. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan.
5. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah.
6. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.
7. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan.
8. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
9. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan.
10. Peningkatan kompetensi pemangku adat.
11. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat.
12. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial.
14. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan sosial
15. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan

Strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah " Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta	Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan	1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan

kepemudaan.	kepemudaan	meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan</li> </ol>
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan</li> <li>2. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah</li> <li>3. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.</li> </ol>
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk memperkuat keberadaannya di masyarakat	Terwujudnya usaha pembinaan peningkatan potensi SDM dan prestasi lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan	Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan</li> <li>2. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial</li> <li>3. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan</li> </ol>
meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.	Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi pemangku adat</li> <li>2. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat</li> <li>3. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat</li> </ol>

meningkatnya koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Terwujudnya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.	Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial</li><li>2. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan sosial</li><li>3. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan</li></ol>
---	--	--	--

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi maka Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2016-2021 mengusulkan program dan kegiatan yang ideal. Program dan kegiatan yang diusulkan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- e. Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset
- f. Program Pengembangan Data dan Pelaporan
- g. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan pemerintahan daerah
- h. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.
- i. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
- j. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
- k. Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama.
- l. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan
- m. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
- n. Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK
- o. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

Berdasarkan uraian program pokok di RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Biro Bina Mental Dan Kesejahteraan Rakyat mengusulkan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian program antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
    - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
    - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
    - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
    - b. Penatausahaan Keuangan SKPD
  5. Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset
    - a. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
  6. Program Pengembangan Data dan Pelaporan
    - a. Pembuatan Data Base Program/Kegiatan Biro
  7. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan pemerintahan daerah
    - a. Monitoring dan Evaluasi Terhadap data dan pelaporan Program Kegiatan Biro Bina Mental dan Kesra (baru)
  8. Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan.
    - a. Koordinasi Bidang Pendidikan
  9. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
    - a. Pembinaan dan Pengembangan usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
    - b. Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat
    - c. Koordinasi Penanganan Kesejahteraan Sosial
    - d. Koordinasi Penanganan Masalah Sosial
    - e. Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS
    - f. Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
    - g. Koordinasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
  10. Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK
    - a. Rapat Koordinasi Kerapatan Adat Nagari se Sumatera Barat

11. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.
  - a. Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang
  - b. Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat
  - c. Biaya Operasional Masjid Raya Sumatera Barat
12. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama  
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung capaian program ini antara lain :
  - a. Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat
  - b. Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan
  - c. Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur
  - d. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  - e. Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Barat
  - f. Pengiriman Khafilah Sumatera Barat Dalam Rangka STQ Nasional
  - g. Pengiriman Khafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional
  - h. Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat
  - i. Pelatihan Qira'atil Khutub Sumatera Barat
  - j. Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat
13. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan
  - a. Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumbar
  - b. Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Imam Masjid
14. Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.  
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
  - a. Pelatihan Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan se Sumatera Barat
  - b. Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumbar
  - c. Fasilitasi dan Pembinaan Masjid se Sumatera Barat
15. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung program ini antara lain :
  - a. Rapat Koordinasi Kepemudaan se Sumatera Barat
  - b. Rapat Koordinasi Lembaga/Organisasi Kepemudaan se Sumatera Barat.

Untuk selanjutnya dapat digambarkan program, kegiatan serta pendanaannya dengan tabel dibawah ini :

TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF  
BIRO BINA MENTAL DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					TAHUN KE-1		TAHUN KE-2		TAHUN KE-3		TAHUN KE-4		TAHUN KE-5		TAHUN- 6		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN																		
01	01	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi															
01	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat dan Honorarium Pegawai Honorer	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	63.336.250	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	91.156.250	1500 surat dan gaji 1 org pegawai honorer	60.356.256	1500 surat dan gaji 1 org pegawai honorer	120.000.000	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	125.000.000	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	130.000.000	1500 surat dan gaji 2 org pegawai honorer	589.848.756
01	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Biro Bina Sosial	12 Bulan	12 Bulan	56.772.000	12 Bulan	56.772.000	12 Bulan	62.449.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	420.993.000
01	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Biro Bina Sosial	12 Bulan	12 Bulan	57.966.400	12 Bulan	57.966.400	12 Bulan	63.763.150	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	424.695.950
01	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman serta snack rapat Biro	12 kali rapat	12 kali rapat	28.000.000	12 kali rapat	28.000.000	12 kali rapat	36.816.000	14 kali rapat	40.000.000	14 kali rapat	40.000.000	14 kali rapat	40.000.000	14 kali rapat	212.816.000
01	05	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Terpenuhinya penyelenggaraan koordinasi melalui rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	32 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 14 kali luar provinsi	33 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 14 kali luar provinsi	200.000.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	288.064.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	300.000.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	300.000.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	325.000.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	325.000.000	34 Kali perjalanan dinas dalam provinsi dan 15 kali perjalanan dinas luar daerah	1.613.064.000



*Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021*

01	01	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
01	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terawatnya mobil dinas biro	1 Unit	1 Unit	26.000.000	1 Unit	26.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	60.000.000	2 unit	70.000.000	3 unit	70.000.000	3 unit	282.000.000
01	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya suku cadang dan biaya service PC, AC dan mesin tik	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	15.000.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	15.000.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	16.500.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	16.500.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	16.500.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	16.500.000	3 AC, 8 Mesin Tik, 7 Komputer	96.000.000
01	01	05	05	Program Peningkatan Sumber	Terlaksananya Peningkatan															
01	05	02	02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dalam dan luar provinsi	luar daerah 3 kali	luar daerah 3 kali	32.625.000	3 kali dalam daerah 3 kali	36.105.000	2 Kali Dalam Daerah dan 1 Kali Luar Daerah	84.644.000	3 Kali Dalam Daerah dan 2 Kali Luar Daerah	100.000.000	6 Kali Dalam Daerah dan 5 Kali Luar Daerah	120.000.000	6 Kali Dalam Daerah dan 6 Kali Luar Daerah	150.000.000	6 Kali Dalam Daerah dan 6 Kali Luar Daerah	523.374.000
01	01	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan															
01	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian	Terselesaikannya LAKIP,	12 Bulan	12 Bulan	12.215.500	12 Bulan	12.215.500	12 Bulan	27.200.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	156.631.000
03	05	06	04	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terpenuhinya honorarium KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Operator SIPKD	12 Bulan	12 Bulan	61.600.000	12 Bulan	61.600.000	12 Bulan	60.585.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	383.785.000
01	01	05	07	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset	Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan															
01	05	07	03	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terbayarnya honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa serta penyimpan, pengurus, operator barang/aset	12 Bulan	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	55.289.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	317.289.000

*Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021*

URUSAN PENDIDIKAN																				
20	03	05	26	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitas pendidikan															
				Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani Bernuansa Surau	Terlaksananya Koordinasi pendidikan bernuansa surau	1 kali Rakor	102.045.000													
				Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam pencegahan kenakalan remaja	Terbinanya siswa dalam pencegahan kenakalan remaja	1 kali Rakor	72.955.000													
03	05	26	02	Kebijakan Bidang Pendidikan (baru)	Terlaksananya koordinasi Bidang Pendidikan				12 kali rapat	150.000.000	12 kali rapat	200.000.000	12 kali rapat	300.000.000	12 kali rapat	400.000.000	12 kali rapat	1.050.000.000		
URUSAN SOSIAL																				
20	03	05	23	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya koordinasi dan fasilitas di bidang kesejahteraan sosial															
03	05	23	01	Pembinaan dan Pengembangan usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya pembinaan dan penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2018	19 kab/kota 1 kali rakerda	19 kab/kota 1 kali rakerda	440.000.000	18 kab kota	500.623.480	4 jenjang pendidikan 19 Kab/Kota	575.000.000	19 Kab/Kota	750.000.000	19 Kab/Kota	780.000.000	19 Kab/Kota	800.000.000	19 Kab/Kota	3.845.623.480
03	05	23	01	Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017			38.021.535			19 Kab/Kota dan 1 Kali Raker	125.000.000	19 Kab/Kota dan 1 Kali Raker	150.000.000	19 Kab/Kota dan 1 Kali Raker	180.000.000	19 Kab/Kota dan 1 Kali Raker	200.000.000	19 Kab/Kota dan 1 Kali Raker	693.021.535
03	05	23	06	Kebijakan bidang Kesejahteraan Sosial (baru)	Terlaksananya koordinasi penanganan kesejahteraan sosial						1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	150.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	180.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	220.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	750.000.000
03	05	23	08	Kebijakan Penanganan Masalah Sosial	Terlaksananya koordinasi dan fasilitas penanganan masalah sosial melalui seminar	1 kali rapat koordinasi	1 kali rapat koordinasi	100.000.000		29.858.868	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	150.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	180.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	210.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	869.858.868
03	05	23	09	Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS	Terlaksananya koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS	1 kali rapat koordinasi	1 kali rapat koordinasi	100.000.000		29.858.868	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	250.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	270.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	270.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi 19 Kab/Kota	1.119.858.868
03	05	23	10	Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penanggulangan KLB						1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	125.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	150.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	170.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	645.000.000
03	05	23	11	Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana						1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	150.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	180.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	200.000.000	1 Kali Rapat Koordinasi dengan 19 Kab/Kota	730.000.000

*Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021*

Urusan Kebudayaan																						
20	03	05	20	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya upaya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup beragama dan sosial budaya oleh Setda Prov. Sumbar																	
	03	05	20	01	Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang	Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan embarkasi haji padang	140 orang PPIH	140 orang PPIH	1.800.000.000	170 Orang PPIH	2.000.000.000	170 Orang PPIH	2.000.000.000	170 Orang PPIH	2.266.018.700	170 Orang PPIH	2.300.000.000	170 Orang PPIH	2.400.000.000	170 Orang PPIH	12.766.018.700	
					Dukungan Terhadap Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat	Terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya Sumatera Barat tahap ke delapan	1 Unit	1 Unit	38.000.000.000	1 Unit	19.502.832.198	1 Unit	12.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	75.502.832.198	
					Finishing Lantai Dasar Masjid Raya Sumatera Barat	Terselesaikannya pembangunan lantai dasar			12.499.950.000												12.499.950.000	
					Biaya Operasional Masjid Raya Sumatera Barat (baru)	Terselenggaranya pembiayaan operasional Masjid Raya Sumatera Barat (Gaji, Imam, Garin, Petugas Kebersihan dan Keamanan)					12 bulan + THR	1.721.035.003	12 bulan + THR	2.000.000.000	12 bulan + THR	2.000.000.000	12 bulan + THR	2.000.000.000	12 bulan + THR	2.000.000.000	12 bulan + THR	7.721.035.003
20	03	05	21	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama	Meningkatnya upaya pembinaan terhadap lembaga didikan subuh se Sumatera Barat oleh Setda Prov. Sumbar																	
	03	05	21	01	Penilaian Didikan Subuh Berprestasi Provinsi Sumatera Barat	Terbinanya Lembaga Didikan Subuh di Kab/Kota dan Tersalurkannya bantuan untuk lembaga didikan subuh	19 Lembaga Didikan Subuh	19 Lembaga Didikan Subuh	260.000.000	11 Lembaga Didikan Subuh	77.633.056	19 Lembaga Didikan Subuh	286.000.000	19 Lembaga Didikan Subuh	320.000.000	19 Lembaga Didikan Subuh	320.000.000	19 Lembaga Didikan Subuh	320.000.000	19 Lembaga Didikan Subuh	1583.633.056	
	03	05	21	02	Pencerahan Agama dan Silaturahmi Bulan Ramadhan	Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Masjid yang ada di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat	147 Masjid	147 Masjid	1.050.000.000	147 Masjid	505.573.000	147 Masjid	1.155.000.000	147 Masjid	1.300.000.000	147 Masjid	1.200.000.000	147 Masjid	1.200.000.000	147 Masjid	6.410.573.000	
	03	05	21	03	Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di Lingkungan Kantor Gubernur	Terselenggaranya wirid pengajian di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar	48 Minggu	48 Minggu	100.000.000	48 Minggu	29.858.868	48 Minggu	100.000.000	48 Minggu	110.000.000	48 Minggu	110.000.000	48 Minggu	110.000.000	48 Minggu	559.858.868	

*Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021*

	03	05	21	04	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Terselenggaranya acara peringatan hari besar islam di lingkungan pemerintah Prov. Sumbar	4 Kali	4 Kali	90.000.000	4 Kali	26.872.981	6 Kali	100.000.000	6 Kali	120.000.000	6 Kali	120.000.000	6 Kali	120.000.000	6 Kali	576.872.981					
	03	05	21	06	Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/ah Sumatera Barat	Terselenggaranya pelatihan terhadap kafilah potensial sumbar	48 Peserta	48 Peserta	200.000.000		332.200.500	60 Orang	365.420.550	60 Orang	400.000.000	60 Orang	400.000.000	60 Orang	400.000.000	60 Orang	400.000.000	60 Orang	2.097.621.050			
	03	05	21	07	Pengiriman Khafilah Sumatera Barat Dalam Rangka STQ Nasional	Tersedianya persiapan dan pengiriman kafilah sumatera barat ke ajang STQ Nasional				40 orang rombongan	1.000.000.000			65 kafilah	2.000.000.000			65 kafilah	2.920.000.000	65 kafilah	5.920.000.000					
					Pengiriman Khafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional	Terselenggaranya persiapan dan pengiriman kafilah Sumatera Barat ke Ajang MTQ Nasional	100 Kafilah	100 Kafilah	2.567.040.000			80 orang kafilah sumbar	2.870.999.900			80 orang kafilah sumbar	2.920.000.000					8.358.039.900				
	03	05	21	08	Pelatihan Guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat	Terselenggaranya pelatihan terhadap guru TPQ/MDTA se Sumatera Barat	70 Orang Peserta	70 Orang Peserta	191.484.850		191.484.850	95 Orang	210.633.335	95 Orang	230.000.000	95 Orang	210.000.000	95 Orang	210.000.000	95 Orang	210.000.000	95 Orang	1.243.603.035			
					Pelatihan Qira'atil Khutub Sumatera Barat (baru)	Terselenggaranya Pelatihan Terhadap Kafilah Potensial Sumatera Barat						40 peserta	220.734.250			40 peserta	220.000.000					440.734.250				
					Pengembangan Tilawatil Quran se Sumatera Barat (baru)	Terselenggaranya Pengembangan Tilawatil Quran di Sumatera Barat baik melalui MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat Maupun Pembinaan Dewan Hakim di Sumatera Barat						161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	465.183.500		161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	500.000.000	161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	500.000.000	161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	500.000.000	161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	500.000.000	161 Peserta 9 Narasumber Nasional, ( Narasumber Daerah 2 x sertifikasi dewan hakim	1.965.183.500		
	20	03	05	22	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Meningkatnya upaya fasilitasi pendidikan agama dan keagamaan se Sumatera Barat																				
	03	05	22	02	Fasilitasi Pembinaan Pondok Al-Qur'an se Sumbar	Terbinanya tenaga pengajar Pondok Al-Qur'an di kab/Kota				20 peserta	94.716.135	90 Orang	348.933.900	90 Orang	348.934.025	90 Orang	380.000.000	90 Orang	380.000.000	90 Orang	380.000.000	90 Orang	1.552.584.060			
	03	05	22	04	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Imam Masjid	Terselenggaranya pelatihan terhadap imam masjid se Sumatera Barat				37 orang	55.537.494	90 Orang	204.600.000	90 Orang	230.000.000	90 Orang	270.000.000	90 Orang	330.000.000	90 Orang	330.000.000	90 Orang	1.090.137.494			

*Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021*

	20	03	05	23	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat															
	03	05	23	02	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang/Uang Pengurus Rumah Ibadah dan Organisasi Keagamaan se Sumatera Barat	Terselenggaranya pelatihan Terhadap Akuntansi Masjid se Sumatera Barat	60 Orang	60 Orang	90.000.000	20 peserta	37.323.584	3 x angkatan 90 orang total 270 orang peserta	276.584.500	3 x angkatan 90 orang total 270 orang peserta	500.000.000	3 x angkatan 90 orang total 270 orang peserta	500.000.000	3 x angkatan 90 orang total 270 orang peserta	1.903.908.084		
	03	05	23	03	Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumbang	Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan di Sumatera Barat	19 Kab/kota 1 kali rapat koordinasi	19 Kab/kota 1 kali rapat koordinasi	250.000.000	19 kab kota	64.196.565	19 Kab/Kota 95 orang peserta	136.500.000	19 Kab/Kota 95 orang peserta	275.000.000	19 Kab/Kota 95 orang peserta	300.000.000	19 Kab/Kota 95 orang peserta	1.305.696.565		
					<b>URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>																
	20	03	05	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program kepemudaan di sumatera barat															
					Rapat Koordinasi Kepemudaan se Sumatera Barat (baru)	Terlaksananya rapat koordinasi kepemudaan	90 peserta 1 kali rakor	90 peserta 1 kali rakor	125.000.000			4 kali rapat koordinasi 60 Orang	350.000.000	4 kali rapat koordinasi 60 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 60 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 60 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 60 Orang	400.000.000
					Rapat koordinasi Lembaga/Organisasi Kepemudaan se Sumatera Barat	Terlaksananya pembinaan terhadap kreativitas generasi muda						4 kali rapat koordinasi 80 Orang	350.000.000	4 kali rapat koordinasi 80 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 80 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 80 Orang	400.000.000	4 kali rapat koordinasi 80 Orang	400.000.000

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, telah ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yakni **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu di dukung oleh misi yang kemudian diturunkan kedalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang juga telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yang hirarkinya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**VISI**

**Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama 3. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)
	2. Penguatan kelembagaan agama dan adat	1. Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial 2. Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat. 3. Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai

MISI	TUJUAN	SASARAN
		adat dan budaya dalam masyarakat.
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	1. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme	1. Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur. 2. Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur.
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas. 2. Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
	3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi	1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.	1. Meningkatnya tingkat pendidikan 2. Meningkatnya integritas peserta didik.
	2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.	1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.	1. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja. 2. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca.
	4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	1. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

MISI	TUJUAN	SASARAN
	5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata. 2. Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga. 4. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. 5. Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak.
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.	1. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan. 3. Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya 4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan 5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.	1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan. 2. Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis. 3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan. 1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah 1. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara. 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin 2. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka



MISI	TUJUAN	SASARAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menuntaskan penanganan daerah tertinggal</li> <li>4. Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ol>
<p>Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah.</li> <li>2. Meningkatnya infrastruktur penunjang percepatan pembangunan ekonomi dan kawasan pantai barat.</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi</li> <li>4. Meningkatnya keselamatan lalu lintas</li> <li>5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi.</li> <li>6. Meningkatnya ketersediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan.</li> <li>7. Meningkatnya pemanfaatan energy baru dan terbarukan (EBT)</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang.</li> <li>2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</li> <li>3. Terpeliharanya fungsi ekosistem.</li> <li>4. Meningkatnya kualitas lahan.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya resiko bencana.</li> <li>2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.</li> <li>3. Meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap bencana.</li> </ol>

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
	4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.	1. Terpeliharanya debit sungai. 2. Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut.

Indikator kinerja Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 7.2 dibawah ini :

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA BIRO BINA MENTAL DAN KESRA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	
1	Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan	6	6	6	6	6	6	6	100
2	Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	10	10	10	10	10	10	10	100
3	Persentase peningkatan penyaluran zakat dari Badan Amil Zakat (Baznas)	10	10	10	10	10	10	10	100

Indikator kinerja di atas dapat dijelaskan pengukurannya sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan.

Pengukuran terhadap indikator ini adalah melalui membagi jumlah kuota jemaah haji yang di berangkatkan dengan jumlah calon haji yang mendaftar setelah dikurangi jumlah jemaah yang telah berangkat

2. Persentase peningkatan zakat yang dikelola badan amil zakat (BAZNAS)

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini adalah melalui membagi jumlah penerimaan zakat tahun ke N dengan jumlah zakat yang diterima pada tahun ke N-1

3. Persentase peningkatan penyaluran zakat dari badan amil zakat (BAZNAS)

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini ini dilakukan melalui membagi jumlah penyaluran tahun ke N dengan jumlah zakat yang disalurkan tahun N-1





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Renstra Biro Bina Mental dan Kesra) Tahun 2016-2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang memberikan gambaran tentang Isu-isu Strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renstra Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.